

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DKI Masih Punya Dana Bansos Rp 4,1 T

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyisakan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, total anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui belanja tidak terduga (BTT) untuk bansos selama Covid-19 mencapai Rp 5,3 triliun. Jadi, sejak Mei hingga Juni 2020, dana bansos yang telah dicairkan sebesar Rp 1,2 triliun.

Edi mengatakan, bila anggaran tersebut tidak cukup, pemerintah akan mengalokasikannya kembali saat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2020 pada Agustus 2020. "Kalau ditanya ada atau *nggak*, ya .. duitnya berjalan seiring penerimaan (pajak) yang masuk. Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember 2020 ini mudah-mudahan ini cukup," kata Edi saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan anggarannya untuk penanganan Covid-19 sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk tiga sektor, di antaranya kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. "Tiga sektor ini yang harus dijaga, sehingga Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan Rp 5,3



Kompas.com/Nurita Sari

triliun," ujarnya.

Dana bagi hasil

Di sisi lain, Pemprov DKI juga menganggarkan sekitar Rp 4,8 triliun untuk bansos lainnya yang selama ini telah berjalan. Bansos itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Lansia (KJL), dan sebagainya.

Menurutnya, pada bulan



Kalau ditanya ada atau *nggak*, ya .. duitnya berjalan seiring penerimaan (pajak) yang masuk.

Edi Sumantri
Kepala BKD DKI Jakarta

Desember 2020 ini pemerintah daerah akan mendapatkan DBH 2019 dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 triliun. Saat ini DKI baru menerima DBH 2019 yang dibayar 2020 sebesar Rp 2,6 triliun dari Rp 5,1 triliun.

"Plutang kami akan dibayar 50 persen dari Pemerintah Pusat pada Desember nanti," ujarnya.

Lebih lanjut APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp 47 triliun. Namun, APBD DKI Jakarta itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memasuki masa transisi.

"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti, ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus 2020. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau *nggak*. Maret-April praktis hiburan nol. Hotel tutup dan penerimaan rendah," jelas Edi. (faf)